

Kebijakan Moneter Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Arjuna¹, Michael Schumacher², Sukma Kartika³, Anas Malik⁴

¹⁻⁴UIN Raden Intan Lampung Prodi Ekonomi Syariah

Email : michaelshomacher12@gmail.com

ABSTRACT :

Financial authorities use monetary policy as an important tool to maintain macroeconomic stability, especially with regard to managing the money supply, interest rates, and inflation. From an Islamic economic perspective, justice, enforcement of usury, and development of real sector economic activities are political monetary priorities. This essay discusses the impact of traditional monetary policy on the Indonesian economy and looks at alternative sharia-compliant monetary policies that are in line with Islamic values. By using an analytical approach, this research finds that instruments such as zakat financing, qard hasan, and mudharabah can help stabilize the economy without depending on interest rates. In addition, this research found challenges related to implementing sharia-based monetary policy in Indonesia, such as regulatory structures, public literacy levels, and collaboration between Islamic and conventional financial institutions.

Keywords: Financial Regulation, Islamic Economics, Economic Stability, indonesia, sharia financial sytem

ABSTRAK :

Otoritas keuangan menggunakan kebijakan moneter sebagai alat penting untuk menjaga stabilitas makro ekonomi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan jumlah uang beredar, suku bunga, dan inflasi. Dari perspektif ekonomi Islam, keadilan, penegakan riba, dan pengembangan aktivitas ekonomi sektor riil adalah prioritas moneter politik. Esai ini membahas dampak kebijakan moneter tradisional terhadap perekonomian Indonesia dan melihat alternatif kebijakan moneter sesuai syariah yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan menggunakan pendekatan analitik, penelitian ini menemukan bahwa instrumen seperti pembiayaan zakat, qard hasan, dan mudharabah dapat membantu stabilitas perekonomian tanpa bergantung pada suku bunga. Selain itu, penelitian ini menemukan tantangan terkait dengan penerapan kebijakan moneter yang berbasis syariah di Indonesia, seperti struktur regulasi, tingkat literasi masyarakat, dan kolaborasi antara lembaga keuangan Islam dan konvensional.

Kata kunci : Pengaturan Keuangan, Ekonomi Islam, Stabilitas Ekonomi, Indonesia, sistem keuangan syariah

PENDAHULUAN

Instrumen bank Indonesia yang disebut kebijakan moneter dimaksudkan untuk mengontrol faktor-faktor finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk menjaga kestabilan nilai uang, baik terhadap elemen dalam dan luar. Stabilitas harga, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi riil yang optimun, dan stabilitas ekonomi, disebut stabilitas nilai uang.

Dalam hal pengendalian perekonomian nasional, kebijakan moneter adalah yang paling penting. Namun, perbedaan antara sistem ekonomi yang berlaku akan menghasilkan perspektif yang berbeda tentang kebijakan moneter. Sistem ekonomi konvensional berbeda dengan sistem ekonomi lainnya dalam hal kebijakan moneter.

Salah satu tujuan sistem ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Iqamah atau keadilan adalah tujuan dari maqashid syariah. al' Adl) adalah mewujudkan keadilan di setiap aspek kehidupan manusia dan menghasilkan kemaslahatan (jalb al maslahah), yang berarti menghasilkan kemaslahatan khusus untuk seseorang.

Perekonomian secara keseluruhan akan dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di sektor moneter. Peningkatan pembiayaan bank syariah akan berdampak pada keseimbangan ekonomi, yang pada gilirannya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan syariah di Indonesia telah berkembang dengan lambat. Ini terlihat dari peningkatan instrumen moneter syariah seiring dengan peningkatan kinerja dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Dengan mempertimbangkan peningkatan pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diberikan oleh perbankan syariah Pada bulan Juli 2021, DOK yang berhasil dihimpun oleh perbankan syariah mencapai Rp 504 triliun dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan sebesar Rp 405 triliun. Perkembangan aset dan DPK dan pembiayaan perbankan syariah meningkat setiap bulan. tahun dan peningkatan positif selama pandemi. Dengan pengecualian saham syariah, aset keuangan syariah Indonesia mencapai total Rp 1.802,86 triliun, atau 127.82 miliar AS, pada desember 2020.

Di sisi lain, jumlah rekening bank syariah telah meningkat, seperti yang ditunjukkan oleh 40 rekening DPK dan 6 juta rekening pembiayaan per Juli 2021. 12 bank umum syariah masih menguasai 65,73% dari total tersebut. rekening bank.

Adanya instrumen moneter untuk mendukung likuiditas perbankan syariah, seperti pasar Uang Antar-Bank Syariah (PUAS) dan sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Selain itu, sifat keuangan syariah menunjukkan adanya hubungan langsung antara sektor moneter dan sistem ekonomi. Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah akan meningkat seiring dengan kekuatan sistem keuangan syariah. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan pembiayaan bank syariah, yang berdampak pada jumlah barang dan jasa yang dibuat oleh masyarakat. Dengan peningkatan produktivitas masyarakat, ada kemungkinan pemenuhan kebutuhan domestik dan pilihan untuk melakukan Ekspor barang ke luar negeri juga akan meningkat. Ini akan meningkatkan pendapatan negara dari devisa yang akan digunakan untuk membeli barang modal yang dibutuhkan dalam negeri.

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Moneter

Untuk mengontrol pasokan uang tunai, biaya pinjaman, dan aktivitas moneter lainnya dalam perekonomian, kekuatan terkait uang, biasanya bank nasional, menggunakan strategi terkait uang. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk memastikan keamanan biaya, pertumbuhan moneter yang disesuaikan, dan kekuatan kerangka moneter. Beberapa instrumen pengaturan keuangan yang paling umum digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Kontrol Penawaran Uang: Bank sentral dapat mengontrol penawaran uang dalam perekonomian dengan mengeluarkan uang dari pasar atau melakukan intervensi langsung dalam pasar uang.
- 2) Pengaturan Suku Bunga: Bank sentral dapat mengubah tingkat suku bunga dengan mengubah suku bunga acuan atau suku bunga resmi. Menaikkan suku bunga cenderung mengurangi pengeluaran konsumen dan investasi, yang dapat membantu mengendalikan inflasi. Sebaliknya, penurunan suku bunga dapat merangsang pertumbuhan dan aktivitas ekonomi.
- 3) Operasi Pasar Terbuka: Ini adalah ketika bank sentral membeli atau menjual surat berharga pemerintah di pasar terbuka untuk mempengaruhi likuiditas dan suku bunga. Pembelian surat berharga menghasilkan peningkatan penawaran uang, sementara penjualan surat berharga dapat menghasilkan penurunan penawaran uang.

- 4) Persyaratan Cadangan: Bank sentral dapat menetapkan persyaratan cadangan, yaitu jumlah deposito yang harus disimpan oleh bank sebagai cadangan tunai. Menurunkan persyaratan cadangan dapat meningkatkan likuiditas dan mendukung pertumbuhan kredit, sementara meningkatkannya dapat mengurangi likuiditas dan membatasi pertumbuhan kredit.
- 5) Kebijakan Komunikasi: Bank sentral juga dapat mempengaruhi perilaku ekonomi dan ekspektasi pasar melalui penerapan kebijakan komunikasi. Pernyataan resmi, pidato, atau konferensi pers pejabat bank sentral dapat menunjukkan jalan kebijakan moneter yang akan datang.

Perekonomian dipengaruhi oleh strategi keuangan secara mendasar, termasuk tingkat ekspansi, biaya pinjaman, spekulasi, pemanfaatan, dan perkembangan moneter secara umum. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan strategi keuangan dengan benar dan hati-hati untuk menjaga stabilitas moneter negara.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan terus-menerus dalam jumlah produk dan tenaga kerja di suatu negara atau wilayah dalam jangka waktu tertentu disebut pertumbuhan ekonomi. Banyak orang menggunakan PDB (Produk Domestik Bruto) atau Pendapatan Publik Bruto (GNP) untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. GNP adalah total nilai penciptaan produk dan tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Berikut ini adalah beberapa komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi:

- 1) Investasi: Inovasi dan produktivitas dapat meningkat dengan investasi besar dalam infrastruktur, teknologi, dan modal manusia. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
- 2) Konsumsi: Peningkatan konsumsi rumah tangga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena permintaan akan barang dan jasa meningkat.
- 3) Inovasi dan Teknologi: Inovasi dan kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan menciptakan sektor ekonomi baru yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
- 4) Kebijakan Fiskal dan Moneter: Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah tentang pengeluaran publik, pajak,

dan subsidi serta kebijakan moneter seperti penawaran uang dan suku bunga.

Banyak negara menginginkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, perlu diingat bahwa pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan inklusi sosial dan kelestarian lingkungan, serta memenuhi kebutuhan generasi mendatang.

C. Kebijakan Moneter dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Untuk mencapai tujuan keuangan yang sesuai dengan standar syariah, pendekatan dan pengembangan moneter dalam perspektif Islam diharuskan. Salah satu aturan utama yang membentuk pendekatan Islam terhadap strategi keuangan dan pembangunan moneter adalah:

- 1) Keadilan dan Keseimbangan: Prinsip keadilan dan keseimbangan sangat penting dalam Islam, termasuk dalam kebijakan moneter. Kebijakan moneter Islam harus memastikan bahwa distribusi kekayaan dan akses ke sumber daya finansial dilakukan secara adil dan seimbang.
- 2) Larangan Riba: Dalam Islam, riba dianggap sebagai perbuatan yang tidak etis dan dilarang. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam harus mendukung penggunaan instrumen keuangan yang bebas dari riba, seperti mudharabah (bagi hasil) dan profit-sharing, serta mendorong transaksi yang adil dan berkeadilan.
- 3) Stabilitas Harga: Tujuan utama kebijakan moneter Islam adalah untuk menjaga stabilitas harga, dengan tujuan mencegah inflasi yang merugikan masyarakat dan merusak daya beli uang. Namun, pendekatan Islam juga memperhatikan keadilan dalam pembagian kekayaan, yang memastikan bahwa stabilitas harga tidak dicapai dengan merugikan golongan yang lebih lemah.
- 4) Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan: Menurut perspektif Islam, pertumbuhan ekonomi bukan hanya meningkatkan pendapatan atau produksi, tetapi juga menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan. Kebijakan moneter harus membantu

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Menurut perspektif Islam, pengaturan keuangan harus fokus pada standar-standar ini untuk memastikan kesehatan keuangan, pembagian kekayaan yang adil, dan, pada umumnya, bantuan pemerintah yang ramah. Hal ini akan sesuai dengan hikmah dan keuntungan agama Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif Untuk memahami secara menyeluruh bagaimana kebijakan moneter Indonesia diterapkan dan dampaknya terhadap perekonomian dari sudut pandang ekonomi Islam, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analitis. Studi kasus adalah jenis penelitian yang digunakan. Penelitian ini akan menganalisis kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dan mengevaluasinya dari sudut pandang ekonomi Islam

Penelitian ini berharap dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang hubungan antara kebijakan moneter dan perekonomian Indonesia dalam konteks ekonomi Islam. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan saran yang bermanfaat bagi akademisi dan pengambil kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian kebijakan moneter

Kebijakan moneter merupakan usaha untuk mengontrol keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai rencana melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dikenal sebagai kebijakan moneter. arah, inflasi, dan keseimbangan output di hampir semua sektor. Karena sektor moneter menghasilkan keuntungan lebih cepat daripada sektor riil, ekonomi berkembang lebih cepat.

Dalam sistem moneter konvensional, tujuan kebijakan moneter adalah untuk mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat. Di sisi lain, dalam sistem moneter Islam, kebijakan moneter tidak menggunakan instrumen bunga eksisi di pasar. Kebijakan moneter Islam lebih berfokus pada menjaga agar sumber daya ekonomi berputar. Dengan kata lain, para regulator harus memastikan bahwa bisnis ekonomi dan instrumen keuangan syariah tersedia untuk menerima investasi dari masyarakat. Dengan demikian, waktu yang dihabiskan oleh setiap pemilik dana untuk

menyimpan uang akan diminimalkan, dengan waktu tertentu berdampak pada kecepatan. Dengan kata lain, memberikan peraturan yang mencakup peluang bisnis, instrumen keuangan syariah, dan peraturan Semua hal yang berkaitan dengan arus uang masyarakat akan semakin cepat berkembang. Mengontrol jumlah uang beredar agar tidak beredar adalah salah satu kebijakan moneter. sangat banyak. Jika banyak uang yang beredar, inflasi akan terjadi, yang dapat mengurangi daya beli masyarakat.¹

Tujuan Kebijakan Moneter

Tujuan Bank Indonesia adalah untuk mempertahankan dan mempertahankan kestabilan nilai rupiah, seperti yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 1999 dan sejalan dengan UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 tentang Pasal 7. Rupiah stabil memiliki dua aspek. Karakteristik pertama dari stabilitas rupiah adalah ketahanan terhadap inflasi dan perubahan harga barang dan nilai tukar. Karakteristik kedua terkait dengan perubahan nilai Rupiah dibandingkan dengan mata uang asing.

Indonesia menggunakan sistem nilai tukar mengambang, atau free floating, untuk melemahkan rupiah terhadap mata uang asing. Stabilitas nilai tukar sangat penting untuk mencapai harga yang stabil dan sistem keuangan yang stabil. Akibatnya, Bank Indonesia juga mulai mengambil tindakan untuk memastikan bahwa nilai tukar tetap stabil dan sesuai dengan tujuan utamanya untuk terus memantau mekanisme pasar. Sejak 1 Juli 2005, Bank Indonesia telah menerapkan Framework Targeting Inflation untuk mencapai tujuan tersebut di atas. ITF. Proyek saat ini memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam hal ini, pesan utama yang harus ditekankan adalah inflasi. Untuk meningkatkan efisiensi, Bank Indonesia secara teratur melakukan pemurnian kerangka kebijakan moneter untuk menyesuaikannya dengan perkembangan ekonomi.² Stabilitas nilai tukar sangat penting untuk mencapai harga yang stabil dan sistem keuangan yang stabil. Akibatnya, Bank Indonesia juga memulai penelitian volatilitas mata uang untuk mengurangi ketidakpastian mata uang dari biasanya, bukan meningkatkan ketidakpastian mata uang ke tingkat tertentu. Bank Indonesia dapat menerapkan

kebijakan moneter dengan menetapkan tujuan uang, seperti jumlah uang beredar atau suku bunga.

lebih-lebih lagi jika dibandingkan dengan tingkat inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mencapai tujuan kebijakan moneter ini, berbagai instrumen digunakan. Ini termasuk berdagang di pasar valuta asing dalam rupiah dan mata uang lainnya, menetapkan batas pembayaran, menetapkan cadangan minimum, dan mengatur kredit dan pinjaman. Selain itu, Bank Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi keuangan setiap hari sesuai dengan peraturan Syariah.

Prinsip – Prinsip Kebijakan Moneter

Sistem moneter Islam didasarkan pada prinsip ekonomi Islam berikut ini:

1. Cita-cita tertinggi adalah milik Allah, satu-satunya pemilik mutlak.
2. Manusia adalah penguasa bumi (kholifah), namun tidak pemilik sebenarnya.
3. Semua kekayaan serta keuntungan umat muslim adalah hasil dari rahmat Allah, dan akibatnya, saudara-saudaranya yang sedikit nakal pun berhak membela diri terhadap saudara-saudaranya yang sama-sama nakal.
4. Kekayaan tidak bisa diulang atau disiarkan ulang.
5. Kekayaan harus dikeluarkan.
6. Mengatasi ketidakseimbangan antara standar ekonomi individu dapat mengurangi konflik antar pemerintah.
7. Menegaskan kembali kewajiban mendesak dan tak terhindarkan yang dimiliki setiap orang, terutama mereka yang tergabung dalam komunitas yang tidak patuh.

Sistem moneter syariah harus jauh dari unsur riba dan obligasi bank. Dalam ekonomi Islam, dilarang menggunakan uang di bank, bahkan riba. Dengan pelarangan ini, bunga bank yang dianggap sebagai instrumen utama pengelolaan keuangan tidak lagi beroperasi. Sistem moneter Islam didasarkan pada aturan emas untuk sukses. Prinsip kebijakan moneter yang sehat lainnya meliputi:

- a. Ini memiliki satu tujuan utama, yaitu meningkatkan rasa aman masyarakat (sasaran inflasi), sebagai kontribusi utamanya. Dalam hal ini, strategi inflasi diterapkan dengan menyeimbangkan biaya (trade-off) dengan pertumbuhan

ekonomi.

- b. Agar uang lebih antisipatif (berwawasan ke depan), perlu diarahkan uang yang digunakan saat ini untuk memenuhi tujuan inflasi yang akan diamati di masa depan dengan tetap memperhatikan kemungkinan terjadinya inflasi lagi dalam efek uang beredar.
- c. Pelajari tentang mekanisme spesifik yang digunakan untuk menghasilkan respons pemilihan biaya untuk permintaan pendanaan. Pada tahap awal respons kebijakan moneter, bank sentral mempertimbangkan ekspektasi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan banyak faktor lainnya. Meliputi pembahasan tentang kebijakan ekonomi pemerintah sebagai bagian dari koordinasi moneter dan kebijakan ekonomi makro lainnya.
- d. Sesuai dengan prinsip “good governance” meliputi “tujuan yang jelas, konsistensi, transparansi dan akuntabilitas”.

Kebijakan moneter Islam harus menghindari riba dan bunga bank. Riba, termasuk bunga bank, secara eksplisit diharamkan dalam Islam. Dengan pengharam ini, bunga bank, yang secara historis merupakan instrumen penting untuk pengelolaan moneter dalam ekonomi kapitalis, tidak lagi relevan. Pasa prinsip hasil adalah dasar manajemen keuangan Islam. Prinsip-prinsip kebijakan moneter yang sehat juga berlaku, seperti:

- a. Menganggap inflasi sebagai tujuan utama kebijakan moneter untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, sasaran inflasi ditetapkan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.
- b. Kebijakan moneter bersifat antisipatif (forward looking). Ini berarti mereka mengatur kebijakan moneter saat ini untuk mencapai sasaran inflasi pada periode yang akan datang karena efek tunda (lag) kebijakan moneter.
- c. Bergantung pada mekanisme tertentu untuk mempertimbangkan penetapan respon kebijakan moneter. Prakiraan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan faktor lain adalah beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh bank sentral saat menetapkan respon kebijakan moneter.

Kebijakan ekonomi pemerintah dipertimbangkan dalam konteks koordinasi kebijakan moneter dengan kebijakan makro lainnya.

- d. Mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang sehat Baik manajemen berarti jelas tentang tujuan, konsisten, transparan, dan berakuntabilitas.

Instrument – instrument Kebijakan Moneter Islam

Dalam hal kebijakan moneter, tujuan Islam serupa dengan tujuan kebijakan moneter umum, yaitu untuk menjaga stabilitas nilai tukar, memastikan transparansi sistem, mendorong keragaman instrumen moneter, dan memastikan mekanisme pasar yang efektif untuk memungkinkan antisipasi ekonomi. ekstensi. Dalam hubungan manusia, tujuan stabilitas mata uang adalah untuk mencapai kepatuhan dan ketulusan. Sekalipun tujuan akhir tidak tercapai, proses yang diikuti pada dasarnya tidak sama dengan proses yang biasa dilakukan. terkait dengan tujuan dan instrumen. Prinsip syariah melarang intervensi pada nilai nominal atau suku bunga, yang membedakan kedua instrumen tersebut.

Oleh karena itu, operasi keuangan tidak dapat secara otomatis menetapkan suku bunga sebagai tujuan atau prinsip operasional jika tujuan operasi keuangan dikaitkan. Metode keuangan Islam diatur oleh hukum Syariah. Ini mencakup hampir semua alat keuangan yang digunakan dalam transaksi mata uang konvensional, serta semua kontrak harga open-end yang sebagian besar bergantung pada bunga.

Oleh karena itu, tidak mungkin untuk melakukan transaksi uang berbasis syariah dengan komponen konvensional yang mengandung suku bunga, seperti suku bunga bank, suku bunga diskonto, atau suku bunga pasar terbuka dengan suku bunga tetap di bawahnya. Namun, banyak ekonom Islam berpendapat bahwa persyaratan Reserve dan sejumlah instrumen kontrol mata uang konvensional dapat digunakan untuk mengatur uang dan kredit, memilih jalur kredit, mengontrol moral, dan mengubah basis moneter. Keamanan integritas atau ekuitas berbasis ekuitas juga dapat digunakan untuk mendefinisikan operasi pasar. Karena hukum Islam melarang sistem suku bunga, bank sentral tidak dapat menetapkan batas saldo yang tepat. Untuk mempertahankan standar keuangan Islam yang sehat, bank sentral Islam membutuhkan peralatan yang memiliki matriks antena yang halus. Dalam situasi seperti ini, ada beberapa aturan bebas bunga yang dapat diterapkan bank sentral untuk menambah atau mengurangi saldo kas. Keterbatasan sistem bunga membuat tidak

mungkin untuk mengubah nilai tukar mata uang ekonomi. Secara spesifik, Chapra mendefenisikan bahwa, instrumen kebijakan moneter yang tepat dengan hukum Islam harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Target M dan Mo Pertumbuhan Setiap tahunnya, bank sentral tetap menjaga jumlah uang beredar (M) sama dengan kebijakan ekonomi nasional. Pertumbuhan M terhubung ke Mo dengan cara yang salah (uang berkapasitas tinggi: uang beredar dan simpanan di bank sentral). Bank sentral harus memberikan ketentuan yang jelas untuk MO yang disetujui untuk digunakan oleh pemerintah, bank umum, dan lembaga keuangan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Mo yang tersedia bagi bank komersial, khususnya dalam wujud mudharabah, harus dilakukan oleh bank sentral untuk alat kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan kredit.
2. Kepentingan Publik terhadap Kinerja-Related Deposits/Currency Deposits (Bagian Publik dari Giro) Rekening giro dari bank komersial dalam jumlah yang ditentukan di atas (minimal 25%) harus dikomunikasikan kepada pemerintah untuk mendanai inisiatif program sosial yang menguntungkan.
3. Bank komersial harus memiliki ritme yang diperlukan dalam jumlah yang ditetapkan di bank sentral. GWM membantu dalam penjaminan simpanan dan membantu mengurangi kebutuhan likuiditas bank. Demikian pula, bank sentral harus mengurangi biaya yang dikenakan untuk memindahkan uang yang diberikan kepadanya oleh bank komersial lokal.
4. Kebijakan kredit (Credit limit) Kebijakan batas kredit yang ditetapkan oleh bank umum untuk memastikan bahwa keputusan kredit dibuat sesuai dengan tujuan keuangan dan untuk mendorong persaingan yang sehat antara bank umum.
5. Alokasi kredit berbasis nilai. Realisasi pinjaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan masyarakat. Akses ke kredit membantu memaksimalkan produksi dan distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh mayoritas penduduk. Manfaat mengajukan pinjaman juga bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan umum penduduk. Ini membutuhkan batas

kredit yang ditetapkan oleh pemerintah dan bank komersial untuk mengurangi risiko dan uang yang dibayarkan ke bank.

6. Teknik Lainnya. Untuk mewujudkan kebutuhan ini, teknik kuantitatif dan kualitatif yang dibahas di atas harus dipadukan dengan ahli lain, seperti persuasi moral atau penalaran moral. Beberapa alternatif instrumen mata uang yang bisa digunakan oleh bank sentral adalah sebagai berikut:

- a) Simpanan pemerintah Kekuatan bank sentral untuk mentransfer rekening giro pemerintah bank komersial dengan bank sentral secara langsung mempengaruhi cadangan bank komersial.
- b) Secara bersamaan mengubah nilai tukar semua bank Di bank cadangan komersial Tujuan dari pertukaran adalah untuk meningkatkan nilai tukar secara bersamaan.
- c) Kumpulan bersama ini didasarkan pada prinsip saling percaya di tempat kerja dan mewajibkan bank komersial untuk menyimpan sebagian simpanannya pada tingkat tertentu untuk melindungi permintaan likuiditas yang mereka terima dari bank lain.
- d) Instrumen berbasis saham Menjual dokumen, saham, dan sertifikat dengan harga tinggi untuk hasil berbasis analisis. Instrumen ini dapat digunakan untuk mengimbangi obligasi pemerintah dalam perdagangan pasar.
- e) rasio laba rugi yang telah berubah Bank sentral menawarkan tarif yang berbeda bagi hasil usaha mudharabah bagi bank umum dan transfer rekening bagi pemilik usaha.
- f) dr. Sidiqi, hubungan refinancing, adalah jenis pinjaman yang ditawarkan bank sentral kepada bank komersial sebagai pembayaran atas qordhul hasan yang mereka berikan.
- g) hubungan pinjaman Rasio mitigasi kredit adalah jenis giro yang dapat dipertahankan dengan bank sentral sebagai bagian dari qordhul hasan yang diberikan lembaga kepada nasabahnya.

Suku bunga yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi dan kebutuhan untuk menstabilkannya membuat tidak mungkin untuk menjamin kesehatan sistem moneter keuangan Islam. Jumlah uang beredar disesuaikan dengan kebutuhan mayoritas Muslim dan ekonomi riil. Pertumbuhan M dapat disesuaikan untuk mencapai kesejahteraan yang ideal, diversifikasi, dan kenyataan dengan harga yang stabil.

Tujuan M dicapai dengan menggabungkan pengeluaran defisit dan pinjaman mudharabah bank sentral ke berbagai lembaga keuangan.

Implikasi Perekonomian Indonesia dari Kebijakan Moneter

Dalam posisinya sebagai bank sentral, Bank Indonesia (BI) menerapkan kebijakan moneter, yang merupakan komponen penting dari stabilitas ekonomi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol jumlah uang beredar, menjaga stabilitas nilai tukar, mengatur inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan menyeluruh tentang berbagai konsekuensi kebijakan moneter bagi perekonomian Indonesia.

1) Stabilitas Inflasi

Stabilitas harga sangat berkaitan dengan kebijakan moneter. Untuk mengendalikan inflasi, BI menggunakan Framework Targeting Inflation (ITF) yang fleksibel. ITF adalah kerangka kerja yang bertujuan untuk menjaga inflasi tetap pada sasaran yang telah ditetapkan pemerintah.

- Instrumen utama: dalam kerangka ini adalah suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR), yang digunakan sebagai alat untuk mengendalikan inflasi. Untuk mengurangi tekanan inflasi, kenaikan suku bunga dilakukan untuk menekan konsumsi dan investasi. Sebaliknya, penurunan suku bunga dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan konsumsi dan investasi.
- Implikasi: Jika inflasi tetap stabil, dunia usaha akan lebih tertarik untuk melakukan investasi jangka panjang. Selain itu, daya beli masyarakat tetap stabil, yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

2) Transmisi Kebijakan ke Sektor Riil

- Saluran suku bunga, kredit, dan nilai tukar adalah beberapa cara kebijakan moneter memengaruhi sektor riil. Saluran Suku Bunga: Biaya pinjaman perbankan menjadi lebih

murah ketika BI menurunkan suku bunga, mendorong bisnis untuk melakukan investasi baru dan meningkatkan produksi. Saluran Kredit: Jika kebijakan moneter akomodatif diterapkan, ketersediaan kredit untuk sektor riil akan meningkat. Kebijakan yang ketat, di sisi lain, dapat mengurangi likuiditas dan memperlambat pertumbuhan ekonomi karena sektor usaha mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit.

- Saluran Nilai Tukar: Nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Karena produk Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar internasional, stabilitas nilai tukar sangat penting untuk mendukung ekspor.

3) Stabilitas Sistem Keuangan

Menjaga stabilitas sistem keuangan adalah tujuan utama dari kebijakan moneter. BI berfokus pada stabilitas harga dan menggabungkan kebijakan makroprudensial untuk mencegah risiko sistemik di sektor keuangan.

- Kebijakan Makroprudensial: Selama krisis ekonomi, seperti pandemi COVID-19, BI mengadopsi kebijakan moneter ekspansif untuk menjaga likuiditas perbankan dan memastikan rasio cadangan wajib perbankan tetap stabil.

4) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja

Melalui meningkatkan investasi dan konsumsi, kebijakan moneter yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

- Pertumbuhan Investasi: Karena biaya modal menjadi lebih murah, bisnis lebih suka meningkatkan investasi mereka ketika suku bunga turun. Ini akan meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja baru.
- Kesempatan Kerja: Permintaan tenaga kerja meningkat sebagai hasil dari aktivitas ekonomi dan investasi yang meningkat, yang mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

5) Implikasi terhadap Neraca Pembayaran

Kebijakan moneter juga berdampak pada neraca pembayaran melalui pengaruhnya terhadap ekspor, impor, dan aliran modal asing.

- Devaluasi dan Ekspor: BI dapat menggunakan kebijakan moneter untuk menjaga daya saing ekspor dengan menurunkan nilai tukar, yang membuat barang Indonesia lebih murah di pasar internasional.
- Aliran Modal Asing: Investasi asing langsung (FDI) dan investasi portofolio menarik masuk ketika nilai tukar dan inflasi stabil. Aliran modal ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Peran strategis kebijakan moneter adalah untuk menjaga stabilitas makroekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kerja sama yang baik antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam mengelola kebijakan moneter dan fiskal secara sinergis.

Kemudian Dalam Implikasi perekonomian Indonesia dalam kebijakan moneter dalam perspektif islam tidak jauh berbeda dari kebijakan moneter konvensional yaitu sebagai Berikut:

1. Stabilitas Inflasi dalam perspektif syariah

Kebijakan suku bunga biasanya digunakan dalam ekonomi konvensional untuk mengontrol inflasi. Namun, dalam ekonomi Islam, bunga tidak digunakan sebagai instrumen moneter karena dianggap sebagai riba, yang dilarang oleh syariah. Sebaliknya, ekonomi Islam mengontrol inflasi melalui metode berikut:

- Pengaturan Jumlah Uang Yang beredar : Bank Indonesia Syariah dapat mengendalikan inflasi dengan membatasi jumlah uang yang beredar melalui instrumen berbasis aset riil seperti sukuk (obligasi syariah), yang memastikan bahwa setiap penambahan uang memiliki basis aset yang nyata. Ini mengurangi risiko inflasi yang disebabkan oleh kelebihan likuiditas.

- Zakat dan Wakaf Produktif : Zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah sarana sosial untuk menyebarkan kekayaan. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk membeli barang melalui dana sosial ini memiliki potensi untuk mengurangi ketimpangan dan menjaga stabilitas harga di pasar.

2. Mendorong Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Melalui kontrak mudharabah (*Profit And Loss Sharing*) dan musharakah (kerjasama antara dua pihak yang berinvestasi dalam usaha), ekonomi Islam menekankan pentingnya investasi berbasis hasil (bagi untung dan rugi).

- Pengaruh terhadap investasi : Karena sistem bagi hasil yang lebih adil dan fleksibel dibandingkan bunga tetap, kebijakan moneter syariah dapat mendorong investasi di sektor riil dan meningkatkan partisipasi usaha kecil dan menengah (UMKM), yang merupakan pilar ekonomi Indonesia.
- Peningkatan Lapangan Kerja: Kebijakan moneter syariah mendorong investasi di sektor riil, menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, larangan spekulasi mengarahkan dana ke sektor produktif, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Stabilitas Nilai Tukar dan Neraca Pembayaran

Melalui larangan spekulasi di pasar valuta asing dan transaksi yang berfokus pada aset riil, ekonomi Islam membantu stabilitas nilai tukar.

Kebijakan moneter syariah mencakup :

- Mengurangi Volatilitas Nilai Tukar : Selain larangan spekulasi, transaksi yang didasarkan pada perdagangan barang dan jasa nyata dapat mengurangi fluktuasi nilai tukar yang disebabkan oleh aktivitas non-produktif. Ini menghasilkan nilai tukar yang lebih stabil dan mendorong perdagangan internasional Indonesia.
- Meningkatkan Daya Saing Ekspor : Produk ekspor Indonesia dapat menjadi lebih kompetitif di pasar internasional dengan sistem keuangan syariah yang stabil dan nilai tukar yang terjaga.

4. Mengurangi Risiko Krisis Keuangan

Kebijakan moneter syariah memiliki banyak keuntungan, salah satunya adalah mengurangi risiko krisis keuangan karena sistem keuangan Islam:

- **Berbasis Aset Riil** : Sistem syariah berbeda dengan sistem konvensional, yang seringkali rentan terhadap gelembung ekonomi karena spekulasi yang tidak didukung oleh aset nyata. Karena itu, setiap transaksi harus didasarkan pada aset riil, yang mengurangi risiko spekulasi berlebihan.
- **Keterbatasan Utang Berbasis Bunga** : Sistem ekonomi Islam memiliki lebih banyak kontrol atas utang karena larangan bunga. Ini memiliki potensi untuk mengurangi kemungkinan gagal bayar, yang merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan krisis keuangan dalam sistem keuangan konvensional.

5. Tantangan Implementasi Kebijakan Moneter Syariah di Indonesia

Walaupun kebijakan moneter syariah memiliki banyak keunggulan, ada beberapa masalah dalam menerapkannya di Indonesia :

- **Minimnya Literasi Keuangan Syariah** : Jumlah masyarakat yang tidak memahami prinsip-prinsip keuangan syariah membuat mereka kurang terlibat dalam instrumen keuangan syariah.
- **Keterbatasan Infrastruktur Keuangan Syariah** : Pasar keuangan syariah dan infrastruktur perbankan Indonesia masih dalam tahap pengembangan dan belum sekompleks sistem keuangan konvensional.
- **Harmonisasi Kebijakan** : Agar tidak terjadi dualisme yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi, kebijakan moneter syariah harus disesuaikan dengan kebijakan moneter konvensional yang berlaku di Indonesia.

Melihat dari sudut pandang ekonomi Islam, kebijakan moneter dapat membantu perekonomian Indonesia menjadi lebih stabil, inklusif, dan berkeadilan.

Dengan menerapkan sistem bagi hasil, pengelolaan uang berbasis aset riil, dan instrumen sosial seperti zakat dan wakaf, kebijakan moneter syariah dapat menjadi alternatif solusi untuk menghadapi tantangan ekonomi global.

Implikasi Pembangunan Ekonomi dari Kebijakan Moneter

Efek perkembangan atau efek kebijakan moneter dapat dibagi menjadi dua kategori yang bermanfaat yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan moneter yang diterapkan dalam rangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki dampak pada perkembangan ekonomi.
2. Strategi aksi aktif, yang bertujuan untuk meredam gejolak dan pertumbuhan ekonomi melalui instrumen kebijakan moneter, digunakan untuk menghentikan pertumbuhan ekonomi yang terpantau dan berkelanjutan.

Penggunaan tingkat bunga sebagai harga modal dan instrumen kebijakan moneter merupakan efek kebijakan moneter pada pembangunan ekonomi kategori pertama. Salah satu prinsip utama ekonomi Islam adalah mengintegrasikan semua sistem keuangan dan perbankan ke dalam sistem berbasis bunga. Ini dilakukan dengan memasukkan semua bentuk praktik perbankan berbasis bunga ke dalam sistem moneter dan keuangan. Hasil dari sistem keuangan dan perbankan menyebabkan dua masalah penting bagi pertumbuhan ekonomi yaitu pemanfaatan sumber daya keuangan secara maksimal dan efisiensi.

Bunga dapat mengurangi jumlah investasi sehingga investasi tidak dapat dimaksimalkan atau dimaksimalkan. Sebagai contoh, jika suku bunga yang terkait dengan data pinjaman adalah $x\%$, ROI dapat direalisasikan hingga $x\%$ dengan menggunakan data ini. Efisiensi marjinal modal (MEC = tingkat pengembalian yang diharapkan).⁸ Dengan kata lain, investasi hanya dapat dilakukan jika efisiensi marjinal modal sama dengan tingkat bunga atas pembayaran yang tunduk pada perdagangan. Peningkatan investasi hanya akan meningkatkan diskonto obligasi dan laba jika utilitas marjinal modal lebih dari $x\%$ dan tingkat diskonto obligasi adalah x . Sebaliknya, dengan menggunakan sistem perbankan dan mata uang yang didasarkan pada kesuksesan atau tidak memiliki MEC, investasi dapat dilakukan lebih cepat. Karena pembagian keuntungan antara perusahaan dan bank didasarkan pada rasio

keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, terlepas dari MEC, baik organisasi maupun lembaga komersial dan keuangan akan mendapat manfaat dari hasil positif selama MEC tetap di atas ambang batas atau nol. Ini dimungkinkan oleh fakta bahwa pinjaman yang diberikan kepada organisasi Ini menunjukkan bahwa berinvestasi dalam keuangan Islam adalah cara yang sangat menguntungkan untuk menghasilkan keuntungan. Jadi, tingkat investasi proyek dan program ekonomi Tingkat investasi dalam ekonomi berbasis pendapatan atau bebas bunga lebih rendah daripada ekonomi berbasis bunga. Tingkat investasi ini cenderung berdampak positif pada lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan komponen ekonomi lainnya, seperti kewirausahaan.

Mengalokasikan dan mengarahkan sumber daya untuk pertumbuhan ekonomi lebih efektif daripada investasi yang lebih besar dalam sistem pra-ekonomi yang bebas bunga. Misalnya, bank atau lembaga keuangan hanya akan memberikan dana untuk proyek tertentu kepada perusahaan yang memiliki peringkat kredit atau kelayakan kredit yang baik. Sebaliknya, perusahaan harus meningkatkan keuntungan atau pertumbuhan yang diharapkan selain mengembalikan modal yang digunakan untuk membiayai proyek. Kelayakan kredit yang lebih baik—juga disebut kelayakan kredit korporasi—dan peluang yang lebih besar untuk menerima modal ini dengan bonus tanpa syarat pengembalian minimum atau investasi.

Bank bebas bunga atau bank yang berorientasi pada hasil memilih proyek dengan pengembalian tinggi atau pengembalian yang diharapkan dalam keadaan lain. Mereka juga cenderung meningkatkan kelayakan kredit perusahaan kepada investor karena keuntungan (hasil) yang dilaporkan langsung terkait dengan likuiditas dan produktivitas bisnis. Oleh karena itu, dana yang tersisa hanya dapat dialokasikan untuk strategi dan proyek investasi yang lebih produktif, yang menunjukkan bahwa alokasi dana saat ini juga lebih efisien. Speaker ini memiliki efek peredam yang membantu pertumbuhan ekonomi.

Salah satu komponen ekonomi uang adalah penghapusan bunga, yang berdampak positif pada distribusi pendapatan dan kekayaan karena pertumbuhan ekonomi tidak banyak meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pendapatan dan kekayaan yang dihasilkannya hanya dapat diidentifikasi dan didistribusikan di antara kelompok masyarakat tertentu. Hanya dalam sistem ekonomi bebas bunga yang pengembalian modal yang diinvestasikan dapat terjadi distribusi pendapatan dan

kekayaan yang adil.. Pengembalian yang diharapkan, juga disebut sebagai pengembalian atas modal yang diinvestasikan, yang diterbitkan oleh bank dan perusahaan mungkin berbeda dari angka yang diumumkan secara umum karena ini adalah perkiraan yang didasarkan pada hasil yang telah dipublikasikan sebelumnya. Metode distribusi yang sama, bahkan dengan keuntungan yang lebih besar, seorang pedagang tidak selalu bisa menjadi lebih sukses. Ini dapat dilakukan dalam ekonomi obligasi, di mana setiap pengusaha hanya perlu membayar biaya kecil untuk strategi investasi obligasi. Ini berlaku terlepas dari investasi investor, selama mereka mendapatkan semua keuntungan dari strategi tersebut setelah membayar sejumlah besar obligasi ke bank terkemuka.

Perkembangan ini harus ditanggapi dalam kebijakan moneter, yang mengubah fungsi suku bunga sebagai harga modal dan alat kebijakan moneter. Ini dapat berhasil bahkan jika taktik aktif tidak berfokus pada kebijakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tertentu.

Pengaruh kebijakan moneter kategori kedua pada pembangunan ekonomi adalah kegiatan aktif yang mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kebijakan moneter dapat digunakan untuk mencapai tujuan utamanya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Alat musik: Bank komersial harus meningkatkan rasio pembayaran kepada investor untuk membayar bagian keuntungan yang lebih besar kepada investor jika bank nasional ingin memperluas sumber daya keuangannya. Ini meningkatkan investasi bank dalam pengelolaan uang rutin. Selain itu, Bank Negara dapat menurunkan GWM, rasio kredit, rasio permintaan deposit, dan pengembalian modal yang ditanamkan untuk menentukan jumlah kredit yang diberikan atau untuk menerapkan pertumbuhan uang beredar. Sebagai akibat dari kondisi ekonomi yang disebutkan di atas, bank berusaha untuk memaksimalkan jumlah uang tunai yang mereka miliki dengan menawarkan berbagai cara kredit kepada pelanggan dan pemilik usaha kecil untuk proyek investasi. Kebijakan moneter yang disebutkan di atas seharusnya menguntungkan pertumbuhan ekonomi.

Alat kebijakan moneter tambahan mungkin tersedia, seperti regulasi kredit atau pinjaman berbasis difusi, dan bujukan moral dapat digunakan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi sehari-hari secara umum dan regional. Oleh karena itu, pemerintah dapat memaksa bank komersial untuk memberikan pinjaman kepada industri terbelakang di wilayah tersebut—industri terbelakang yang membutuhkan

kredit—serta kepada pemerintah daerah terkait dan berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan dana. Untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa ketimpangan, sehingga pendapatan dan kekayaan didistribusikan secara adil ke sektor atau sektor apa pun, daerah atau wilayah apa pun, industri atau industri apa pun, dan ke kelompok atau organisasi massa apa pun.

Kebijakan moneter tidak boleh memiliki kelemahan yang membuatnya rentan terhadap eksploitasi riba dalam ekonomi Islam. Kelemahan ini harus terkait dengan aliran atau siklus ekonomi. Selain itu, untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi, gubernur bank sentral mempertahankan alat keuangan seperti suku bunga utama B, batas kredit bank komersial atau basis kredit, rasio laba, pembiayaan dan pinjaman, dan operasi pasar terbuka. Perilaku moral sesuai dengan tujuan bank sentral.

Negara berkembang sering menciptakan institusi keuangan baru yang dikenal sebagai "bank konstruksi", yang berfungsi sebagai "pemasok dan pemodal" untuk proyek industri seperti penciptaan lapangan kerja industri dan ekspansi industri. Karena dana tersebut harus digunakan untuk proyek-proyek sektor manufaktur, baik konsolidasi maupun ekspansi. Dengan cara ini, setiap bank komersial yang dianggap sebagai bank syariah dapat meminjamkan uang untuk pembiayaan berbasis ekuitas. Oleh karena itu, pinjaman dari bank syariah biasanya digunakan untuk tujuan promosi, administrasi, dan komersial. Dengan menggunakan instrumentasi suku bunga sistem keuangan, bank syariah juga dapat mengontrol komponen penting dari proses industrialisasi dan berpartisipasi dalam kebijakan moneter yang ditetapkan oleh ahli keuangan.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, para ekonom Islam akhirnya menyarankan untuk menggunakan semua alat moneter paling efisien dan efektif yang tersedia. Bagi mereka yang menilai uang menurut prinsip al-Qard al-hasan, penurunan harga mata uang adalah pertanda bencana, dan inflasi akan menyebabkan kematian mereka. Akibatnya, pemerintah dan para ekonom harus bekerja sama untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

Banyak ekonom Muslim, termasuk beberapa cendekiawan, setuju bahwa mempertahankan nilai tukar yang stabil tanpa inflasi yang meluas adalah tugas yang sulit. Ini karena inflasi yang meluas dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mencegah Muslim menetapkan harga sendiri. Para ahli keuangan berpendapat bahwa

kenaikan harga hampir selalu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sepanjang sejarah, Nabi (saw) tidak pernah membiarkan harga naik tanpa kontrol negara ketika praktik pinjaman al-Qard al-Hasan terjadi di masyarakat. Selain itu, indeksasi tidak dilakukan untuk menghilangkan penyebab inflasi atau mengontrolnya.

Prinsip Al-Qard al-Hasan menyatakan bahwa orang yang memberikan bantuan finansial melakukannya untuk Allah (swt) dan kemudian menerima imbalan dariNya. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk menggunakan uang pinjaman untuk menuntut waktu yang hilang dan memungkinkan dolar melemah karena inflasi jika terjadi inflasi. Dalam kasus ini, depresiasi uang tidak berarti ketidakadilan; itu merupakan hasil dari perilaku yang tidak adil, yaitu mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri.

Ada perbedaan antara fenomena Al-Qard al-Hasan yang muncul dan aktif di masyarakat umum dan fenomena yang terjadi di sektor keuangan dan perbankan. Ketika nasabah menitipkan dan meminjamkan uang, lembaga keuangan dan perbankan berfungsi sebagai perantara. Oleh karena itu, untuk memahami fenomena ini, diperlukan kebijakan yang cermat untuk menerapkan hubungan perkreditan dalam bentuk Al-Qardh Al-Hasan. memiliki beberapa masalah yang sangat penting. Pertama, di bawah prinsip khusus al-Qardh al-Hasan, deposan harus melaporkan kepada bank setiap masalah yang terkait dengan pinjaman. Ini berarti prinsip utama al-Qardh al-Hasan yang berlaku bagi individu juga berlaku bagi bank: bank secara hukum bertanggung jawab dan harus bertindak sebagai perantara bagi para penyimpan untuk mendapatkan kembali dana mereka. Prinsip-prinsip ini diterapkan oleh bank. Bank mencadangkan pembagian kas berdasarkan keuntungan yang diperoleh sebelum pengumuman pembagian simpanan untuk menutup kerugian deposan.

Singkatnya, inflasi yang ringan dan terkendali diizinkan dalam ekonomi Islam karena tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi, meskipun inflasi yang ringan juga dapat mendorong pembangunan ekonomi.

KESIMPULAN

Kebijakan moneter memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia, terutama dalam konteks ekonomi Islam. Melalui pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, kebijakan ini dapat mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sistem keuangan konvensional, seperti ketidakstabilan nilai tukar, inflasi, dan risiko krisis keuangan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen non-bunga seperti zakat, qard hasan, dan mudharabah dapat digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, penerapan kebijakan moneter syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi ketimpangan ekonomi, yang sejalan dengan tujuan keadilan dalam ekonomi Islam.

Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan ini, seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan infrastruktur, perlu diatasi agar kebijakan moneter syariah dapat lebih efektif. Dengan sinergi antara kebijakan moneter syariah dan konvensional, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat, perekonomian Indonesia dapat semakin stabil, inklusif, dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, kebijakan moneter yang berlandaskan nilai-nilai Islam memberikan alternatif yang relevan untuk mengelola perekonomian di tengah dinamika global, sekaligus mendukung tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Anisa Mawaddah Nasution. (2023). Penerapan Kebijakan Moneter Islam pada Sistem Perekonomian Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(1), 144–154. <https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7665>
- Anwar, M. (1987). Islamic Justice In A Monetary System. *American Journal of Islam and Society*, 4(1), 135–139. <https://doi.org/10.35632/ajis.v4i1.2743>
- Bisnis, J. J., Syariah, E., & Juni, N. (2024). *Kebijakan Moneter Dan Perkembangan Ekonomi : Perspektif Islam Aulia Fitri Anggraini Institut Agama Islam Negeri Metro Dinda Salsabila Sarly Institut Agama Islam Negeri Metro Wahyu Rama Wirayuda Institut Agama Islam Negeri Metro Alamat : Jl . Ki Hajar Dewa. 2*, 116–136.
- Mansur, A. (2013). Kebijakan Moneter dan Implikasinya terhadap Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Tsaqafah*, 9(1), 57. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.38>
- Purwanto, H. (2017). Kebijakan Pengendalian Moneter di Indonesia dalam Perspektif Perbankan Syari'ah. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 3(01), 103–118. <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1146>
- Rahim, S. (2019). Introduction to Islamic Economics: Theory and Application. *Journal of Business and Economic Analysis*, 02(02), 186–188. <https://doi.org/10.36924/sbe.2019.2206>